

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anthony dan Govindarajan. (2005). *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sketor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bappeda Provinsi DIY. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Tahun 2017*.
- Bappeda Provinsi DIY. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DIY Tahun 2005-2025*.
- Bappeda Provinsi DIY. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DIY Tahun 2012-2017*.
- BPS Provinsi DIY. (2017). *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017*. Yogyakarta: CV. Magna Raharja Tana.
- Haryadi, S. (2014). *Ekonomi, Bisnis, Regulasi, & Kebijakan Telekomunikasi*. Bandung: telecommunication Engineering Institut Teknologi Bandung Indonesia.
- Irene S. Rubin. (2006). *The Politics of Public Budgetting*. Washington: CQ Press.
- Julmansyah, Moh Taquiuddin. (2003). *Politik Anggaran Daerah*. Mataram: Pustaka Konsepsi Nusa.
- Mardiasmo, (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset .
- Meleong. Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitati Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Meleong. Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Meleong. Lexy J. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Midgley, J. (1995). *Social Development, e Developmental Perspektive In Social Welfare*. London: SAGE Publications.
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria. (2000). *Mensiasati Otonomi Daerah*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2005). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Pemda DIY. (2015). *Buku Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Tahun 2017*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.
- Zastrow, C. (2004). *Introduction To Social Welfare (Eight Edition ed.)*. USA: omson Brooks/Cole.

Jurnal :

- BPS Provinsi DIY. (2017). *Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2017*. BPS. Yogyakarta.
- BPS Provinsi DIY. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2016*. BPS. Yogyakarta.
- Ferazzi, G. (2000). "Using the "F" word: Federalism in Indonesia's Decentralization Discourse." *Oxford Journals* 30(2): 63-85.
- Hummam, A. S. (2016). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Dalam Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014-2015 (Studi Kasus Kelompok Kesenian Tari Angguk)* (Doctoral dissertation, FISIP UMY).
- Jaweng, Endi, Robert, (2011). *Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, Analisis CSIS*, Vol. 40. No.2, Jakarta, hlm. 160-161.
- Kaho, J. R. (2012). *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta, Polgov JPP Fisipol UGM.

- Kuncahyo, D. (2017). Penerapan Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY Sebagai Basis Otonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1).
- Midgley, J. (2000). Globalization, Capitalism and Sosial Welfare: A Sosial Development Perspective. *Canadian Sosial Work, Special Issue: Sosial Work and Globalization*, 2(1):13-28.
- Mutiarin, D., & Si, M. (2012). Dinamika Kebijakan Anggaran Publik: Konfigurasi dan Dampak Terhadap Pembangunan di Daerah.
- Sakir, S., & Mutiarin, D. (2016). Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3).

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY.
- Peraturan Gubernur DIY No. 37 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.
- Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan
Pemerintah Daerah DIY.

Peraturan Daerah Istimewa DIY No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten.

Media Massa :

Kompas. 16 Maret, 2017. Ada Apa Dengan DI Yogyakarta. hlm. 3.

Kedaulatan Rakyat. 2 September, 2017. Keistimewaan Harus Bermanfaat Bagi Rakyat.
hlm. 1.

Kedaulatan Rakyat. 4 September, 2017. Keistimewaan Belum Mensejahterakan. hlm.
1.

Kedaulatan Rakyat. 14 September, 2017. Ada Gap Informasi, Para Dukuh Minta
Akses Danais. hlm. 1.

Pikiran Rakyat. 2 Agustus 2017. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi Provinsi DI
Yogyakarta. hlm. 1.